TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA

NAMA : RISK AFRINIDA

NIM : 20220082

EMAIL : riska.afrinida01@gmail.com

STIE AKBK KBP PADANG

A. PENDAHULUAN

Tantangan pendidikan pancasila menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan pancasila dapat diselenggarakan diberbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari perguruan tinggi, misalnya faktor faktor ketersediaan sumber daya. Adapun tantangan yang bersifat eksternal, untuk memahami dinamika dan tantangan pancasila pada era globalisasi. Dirjen dikti mengembangkan esensi materi pendidikan pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan pancasila.
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia.
3. Pancasila sebagai dasar negara.
4. Pancasila sebagai ideologi negara.
5. Pancasila sebagai sistem filsafat.
6. Pancasila sebagai sistem sistem etika.
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang pusat kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami nilai pancasila, filsafat negara, dan ideologi bangsa. Agar mahasiswa menjadi jiwa pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu urgensi pendidikan pancasila adalah untuk membentangi dan menjawab tantangan perubahan dimasa yang akan datang. Dalam undang-undangan republik indonesia, nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan alternatif terbaik dalam melakukan sosial secara damai. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, dan pola pengalaman pancasila.

Contoh urgensi pendidikan pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang terkait dengan tugas yang menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pola pengalaman yang lebih baik dari pada warga negara yang lain karena merekalah yang menentukan kebijakan untuk negaranya. mahasiswa sebagai bentuk perubahan muda dimasa depan yang akan menjadi pembangunan dan pemimpin bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga di negara, lembaga daerah dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai pancasila dikalangan mahasiswa amat penting, yang berprofesi sebagai pengusaha, pegawai, swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua masyarakat mempunyai peran penting terhadap kejayaan bangsa di masa depan.

Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah pendidikan pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kurang tertarik sebagian mahasiswa terhadap pendidikan pancasila). Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik, dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Tujuan pendidikan pancasila menurut UU No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/kep/2003, ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan di harapkan dapat terealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta taqwa kepada tuhan yang maha esa (keyakinan masing-masing), bertingkah-laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elite yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai bersama-sama dengan sila-sila lainnya. Sebagai bangsa yang bertuhan, meyakini kebenaran Tuhan tidak boleh dilakukan dengan cara menegasikan kemanusiaan. Kemanusiaan harus tetap dijunjung sehingga tercipta suasana adil dan beradab. Untuk bisa menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan sosial-politik-ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita gagal menerapkan Pancasila dalam makna sesungguhnya, sebenarnya Pancasila tak sakti lagi. Upaya untuk “membumikan” Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal.

B. PEMBAHASAN

TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA

PENGERTIAN PENDIDIKAN PANCASILA.

Pendidikan Pancasila merupakan kurikulum wajib nasional yang merupakan kelompok mata kuliah wajib umum (MKWU) yang terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengkaji Pancasila secara akademik, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Secara spesifik tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah: Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dilihat dari sisi ilmiah, Kedudukan maupun fungsi dari Pancasila mempunyai pemahaman yang sangat luas dan tidak terbatas, baik dilihat dari segala sisi mengenai Pancasila dan juga fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan deologi negara. pendidikan ialah sebuah upaya yang dilakukan secara sadar juga teratur sesuai rencana demi menciptakan keadaan belajar dan sebuah tahapan pembelajaran supaya peserta didik dapat secara aktif meningkatkan serta memaksimalkan pontensi yang ada di dalalam dirinya.

Tantangan dari dalam di antaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagian contoh di dalamnya. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya keutuhan Bangsa Indonesia dan Pancasila.

Tantangan yang paling berat dan utama, adalah masalah ekonomi dan budaya yang menggilas bangsa ini tanpa ampun. Sebab, ajaran Pancasila yang hakiki sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke bumi tercinta, Indonesia. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era milenial. Tantangan mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di era milenial saat ini butuh usaha keras. Justru tantangan tersebut bukan datang dari materi atau kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru.

Dengan begitu dapat mempunyai kekuatan dalam jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang berakhlak, kecerdasan, berakhlak yang mulia serta memiliki keterampilan yang nantinya diperlukan oleh dirinya didalam kehidupan di lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukakn oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk mengenalkan tentang sebuah ilmu yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup generasi penerus bangsa.

Pendidikan Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut:

1. sarana untuk meningkatkan sikap kesadaran dalam bernegara dan lebih berwawasan nusantara, menciptakan perilaku serta memiliki jiwa cinta tanah air.
2. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa.
1. Menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab luntturnya Bhinneka Tunggal Ika ditengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan.

Fungsi kebudayaan bagi masyarakat dan contoh sebagai berikut:

1. Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat.
2. Memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat.

Dengan adanya Pendidikan tentang Pancasila, menjadi sebuah saranan dalam usaha untuk mengerti, memahami serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

Terdapat beberapa landasan tantangan pendidikan pancasila sebagai berikut:

1. Landasan Pendidikan Pancasila

Sebagai sebuah landasan dalam pendidikan Pancasila sangatlah mendasar yakni sebagai nilai-nilai Pendidikan Karakter. Didalam era globalisasi, pentingnya pendidikan karakter merupakan upaya dalam membangun karakter bangsa agar tidak kalah dalam persaingan global. Berikut beberapa landasan pendidikan Pancasila.

2. Landasan Sejarah (history)

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tercipta melalui serangkaian tahapan panjang. Bangsa Indonesia menempuh jalan yang tidak mudah demi menemukan jati diri bangsa yang memiliki kedaulatan dan berprinsip yang merefleksikan Pancasila sebagai Filsafat hidup, yang memiliki lima dasar utama dan saling memiliki ikatan yang akan selalu terkaitan di dalam setiap sila. Melihat sejarah yang panjang akan membuat seseorang yang mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

3. Landasan Budaya (culture)

Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang terlihat dari peninggalan-peninggalan adat-istiadat serta perilaku dan norma-norma yang tidak tertulis namun tetap dipegang teguh sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan.

Nilai-nilai kebangsaan yang terdapat di dalam setiap sila didalam Pancasila ialah nilai-nilai budaya yang tetap terjaga keasliannya di masyarakat yang memiliki nilai filosofi yang amat mendalam dan merupakan milik masyarakat keseluruhan dan bukan milik golongan tertentu.

4. Landasan Hukum (Yuridis)

Landasan hukum pendidikan Pancasila ialah tumpuan utama sebagai dasar untuk mempelajari Pancasila sesuai ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini ialah Kementerian Pendidikan. Dalam UU No.2 Tahun 1989 pasal 39, yang menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Didalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap Isi kurikulum dan setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa yang karenanya merupakan suatu kewajiban moral agar mewujudkannya dalam berbagai segi kehidupan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Hakikat ideologi Pancasila memiliki makna secara filosofis yakni bangsa Indonesia ialah bangsa yang berlandaskan ketuhanan dan memiliki kemanusiaanyang bertumpu pada sebuah kenyataan. Bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Dan setiap segi perwujudan penyelenggaraan negara setidaknya haruslah berdasar pada nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila yang didalamnya juga meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karenanya dalam perwujudan penyelenggaraan

pemerintahan Pancasila menjadi sumber dari nilai-nilai dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam secara nasional, politik, sosial, hukum, budaya, dan ekonomi serta pertahanan keamanan.

C. KESIMPULAN

Tantangan pendidikan pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan pancasila dapat diselenggarakan diberbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan pendidikan pancasila masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa pancasila sebagai dasar negara republik indonesia kini tak lebih bagaikan macan kertas. Tantangan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di era mileneal saat ini butuh usaha kertas. Justru tantangan tersebut bukan datang dari materi atau kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Di dalam tantangan pendidikan pancasila terdapat beberapa landasan yaitu landasan pendidikan pancasila, landasan sejarah, landasan budaya, landasan hukum, landasan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas*

Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid/

19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.